

**IMPLEMENTASI PROGRAM *SOCIAL SECURITY NUMBER*  
(SSN) DALAM PENDATAAN MASYARAKAT MISKIN DI  
KOTA SAMARINDA**

**Gusna, Cathas Teguh Prakoso**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 13, Nomor 2, 2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program *Social Security Number (SSN)* dalam Pendataan Masyarakat Miskin di Kota Samarinda.

Pengarang : Gusna

NIM : 2002016057

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 17 Juni 2025

**Pembimbing,**



**Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si**  
**NIP 19741120 200501 1 001**

---

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> : eJournal Administrasi Publik
<b>Volume</b> : 13
<b>Nomor</b> : 2
<b>Tahun</b> : 2025
<b>Halaman</b> : 562-573

# IMPLEMENTASI PROGRAM *SOCIAL SECURITY NUMBER* (SSN) DALAM PENDATAAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SAMARINDA

Gusna <sup>1</sup>, Cathas Teguh Prakoso <sup>2</sup>

## *Abstrak*

*Sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kota Samarinda meluncurkan Program Social Security Number (SSN) dengan tujuan untuk mengintegrasikan berbagai bentuk perlindungan sosial ke dalam satu kartu identitas sosial. Fokus utama penelitian adalah implementasi program berdasarkan model implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yang mencakup empat indikator: komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi, serta menyoroti faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Sementara itu, teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian diketahui bahwa implementasi Program Social Security Number (SSN) dalam Pendataan Masyarakat Miskin di Kota Samarinda belum berjalan secara optimal. Situasi tersebut terjadi akibat sejumlah kendala, antara lain lambatnya penyampaian informasi terkait distribusi bantuan Program Social Security Number (SSN), adanya masalah teknis dalam proses pendataan masyarakat miskin yang dilakukan oleh para surveyor, terbatasnya dukungan sponsor pada tahap awal pelaksanaan program, tidak meratanya pembagian kartu SSN yang berfungsi sebagai alat transaksi dan sarana dalam program KUBE, adanya perubahan kebijakan di tengah pelaksanaan, serta ketidaksesuaian antara konsep awal dan implementasi kartu SSN sebagai identitas resmi bagi masyarakat miskin di Kota Samarinda.*

**Kata Kunci :** *Program Social Security Number (SSN), Pendataan Masyarakat Miskin, Integrasi Data*

## **Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang sulit terselesaikan termasuk dinegara berkembang seperti Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan pemerintah telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan memberikan bantuan sosial. Menurut Badan Pusat Statistika Indonesia pada September tahun 2022 kemiskinan mencapai sebesar 9,57% yang mengalami peningkatan sebanyak 0,03% yang sebelumnya 9,54% pada Maret 2022. Pada

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [geuesena@gmail.com](mailto:geuesena@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Provinsi Kalimantan Timur, kemiskinan juga meningkat khususnya pada Ibu Kota Samarinda, kemiskinan terus meningkat dari tahun 2019-2021, pada tahun 2021 mencapai dengan angka kemiskinan 4,99% (42.840 jiwa).

Dalam rangka merespon permasalahan kemiskinan di Kota Samarinda, Pemerintah mengeluarkan peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program *Social Security Number* (SSN). Program ini merupakan bentuk pembaruan data kemiskinan berbasis digital yang dirancang sebagai kartu yang terintegrasi untuk mengakses berbagai layanan sosial, termasuk bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, bantuan bagi fakir miskin, distribusi sembako bagi rumah tangga sangat miskin, serta pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Namun dalam berjalannya program ditemukan indikasi yang bahwa implementasi program saat ini belum berjalan secara optimal. Salah satunya adalah masih adanya masyarakat yang belum menerima kartu *Social Security Number* (SSN) sebagai media penyaluran bantuan dari pemerintah. Adapun e-Warong KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang belum merata disetiap kelurahan dan penggunaan kartu yang belum bisa mengakses semua bentuk bantuan jaminan sosial. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program *Social Security Number* (SSN) dalam pendataan masyarakat miskin di Kota Samarinda dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat selama berjalannya program *Social Security Number* (SSN) dalam pendataan masyarakat miskin di Kota Samarinda.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pembangunan Administrasi di Negara Berkembang***

Menurut Siagian (2009), pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh suatu negara untuk mendorong pertumbuhan serta perubahan yang mengarah pada modernisasi dan pembentukan jati diri bangsa (*nation-building*). Pembangunan ini dirancang untuk dijalankan dalam jangka panjang, menengah, atau pendek, dengan fokus pada aspek transformasi dan kemajuan menuju kondisi yang lebih modern.

Siagian (2004) menyatakan bahwa administrasi merupakan suatu proses menyeluruh dari kerjasama antara dua orang atau lebih, yang dilandasi oleh pertimbangan rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya (Warsono, 2019).

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1976), administrasi pembangunan terdiri dari dua fungsi utama. Pertama, fungsi penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas administrasi negara atau *the development of administration*, yang mencakup aspek organisasi, kelembagaan, prosedur kerja, kepegawaian, serta sarana dan prasarana administrasi. Kedua, fungsi perbaikan administrasi yang bertujuan mendukung perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan secara efektif. Kedua fungsi ini dikenal sebagai

administrasi proses pembangunan atau *administration of development process* (Anggara & Sumantri, 2016).

Dalam hal ini pembangunan administrasi merupakan paya sistematis untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi aparatur pemerintahan agar mampu menjalankan fungsi pelayanan dan pemerintahan secara lebih baik. Pembangunan administrasi merujuk kepada pembangunan atau peningkatan sistem administrasi dan reformasi birokrasi agar administrasi publik menjadi lebih adaptif dan responsif.

Dalam hal ini adanya program *Social Security Number (SSN)* merupakan perwujudan dari pembangunan administrasi di negara berkembang, khususnya pada wilayah Kota Samarinda. Program SSN dilakukan untuk meningkatkan kapasitas administrasi melalui digitalisasi dan integrasi data masyarakat miskin yang mendukung program pembangunan dalam bentuk penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Dengan pelaksanaan program yang terstruktur, terencana, dan melibatkan kerja sama antar pihak, program ini menjadi langkah dari proses modernisasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Samarinda.

### ***Kemiskinan***

Menurut Nugroho (1995), kemiskinan dalam suatu masyarakat dapat dikenali melalui keterbatasan pendapatan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk mencapai standar hidup yang layak. Standar hidup tidak hanya mencakup kebutuhan akan pangan dan layanan kesehatan, tetapi juga meliputi aspek lain seperti kualitas tempat tinggal atau lingkungan permukiman. Dalam pandangan Harahap (2006), kemiskinan dipandang sebagai persoalan pembangunan karena merupakan konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, yang pada akhirnya memicu kesenjangan pendapatan baik antar kelompok sosial maupun antar wilayah.

Pendataan kemiskinan oleh pemerintah perlu dilakukan dalam upaya menjalankan program pengentasan kemiskinan termasuk perbaikan data yang sudah ada. Pendataan kemiskinan bukan sebatas kegiatan administratif tetapi juga menjadi hal yang penting dalam menyusun strategi pembangunan yang adil, merata dan berkelanjutan. Tanpa adanya data akurat masyarakat miskin, bantuan bisa tidak tepat sasaran sehingga pengentasan kemiskinan akan sulit dijalankan karena tidak memiliki data dan sistem yang jelas.

### ***Kebijakan Publik***

Thomas R. Dye (1992) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau keputusan, baik yang dilakukan maupun yang diabaikan oleh pemerintah. Thomas R. Dye menekankan bahwa setiap keputusan pemerintah untuk bertindak mencerminkan adanya kebijakan publik dengan tujuan tertentu. Sebaliknya, keputusan untuk tidak bertindak pun tetap dianggap sebagai bentuk kebijakan publik yang mengandung maksud atau tujuan tersendiri. Dengan kata lain, pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan secara

bijak, sehingga mampu memberikan keuntungan maksimal bagi masyarakat serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian (Soetari, 2014).

Dalam pandangan penulis, kebijakan publik merupakan respons pemerintah terhadap berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Kebijakan ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan secara tepat, sehingga dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang luas bagi masyarakat. Adapun tahap-tahap kebijakan publik yaitu penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi kebijakan, (*policy formulation*), pembuatan kebijakan (*decision making*), implementasi kebijakan (*policy implementation*) dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) (Nurani, 2009)..

### **Implementasi Kebijakan**

Menurut Wahab (1997), implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok dari sektor pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan (Mustari, 2015).

Pressman dan Wildavsky (1978) menjelaskan bahwa implementasi dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk melaksanakan, menyelesaikan, memenuhi, menghasilkan, dan menyempurnakan suatu kebijakan. Secara etimologis, istilah implementasi merujuk pada kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaan melalui penggunaan sarana tertentu guna mencapai hasil yang diinginkan (Purwanto & Sulis, 2018)..

Edwards III (1980) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan penuh tantangan, karena melibatkan berbagai variabel yang dapat menjadi hambatan terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Kajian terhadap implementasi kebijakan publik menjadi aspek krusial dalam studi administrasi publik, karena berkaitan langsung dengan efektivitas kebijakan yang telah dirumuskan oleh pembuat keputusan. Pemahaman terhadap proses implementasi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara perumusan dan hasil kebijakan di lapangan (Purwanto & Sulis, 2018). Lebih lanjut, Edwards III merumuskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat dianalisis melalui empat indikator utama, yaitu: komunikasi, yang mencakup kejelasan dan konsistensi penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana; sumber daya, yang meliputi ketersediaan dana, tenaga, dan sarana pendukung; struktur birokrasi, yang berhubungan dengan mekanisme koordinasi dan pelaksanaan dalam organisasi pemerintahan; serta disposisi atau sikap pelaksana, yaitu komitmen, motivasi, dan kesediaan aparatur dalam menjalankan kebijakan dengan sungguh-sungguh.

### **Program Social Security Number (SSN)**

Program *Social Security Number* (SSN) merupakan salah satu program prioritas dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun yang diluncurkan pada tahun 2022 yang dirancang dalam bentuk satu kartu terpadu, dikenal sebagai *Social Security Card* (SSC), untuk digunakan dalam berbagai jenis layanan. SSN

merupakan inisiatif penanggulangan kemiskinan yang bersifat terintegrasi, dengan tujuan memberikan jaminan sosial dan perlindungan melalui satu kartu yang memfasilitasi akses ke sejumlah layanan publik. Layanan tersebut mencakup bantuan di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan bagi rumah tangga sangat miskin, penyaluran kebutuhan pokok (sembako), jaminan kesehatan, serta bantuan sosial bagi fakir miskin dan penyandang disabilitas.

### ***Definisi Konseptual***

Implementasi Program *Social Security Number* (SSN) dalam pendataan masyarakat miskin di Kota Samarinda merupakan upaya pemerintah dalam melakukan perbaikan data masyarakat miskin di Kota Samarinda. Program ini bertujuan untuk mendata masyarakat miskin secara akurat sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. SSN sendiri merupakan program yang dirancang secara terintegrasi untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial melalui satu kartu yang dapat digunakan dalam berbagai layanan publik. Dalam penelitian ini, implementasi program tersebut dianalisis menggunakan pendekatan George C. Edward III, yang mencakup empat indikator komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu implementasi program *Social Security Number* (SSN) dalam pendataan masyarakat miskin di Kota Samarinda yang dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III dengan indikator komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program. Adapun sumber data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung dengan *key informan* yaitu Kepala Bidang Aplikasi dan Layanan *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, termasuk penelusuran informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan juga situs internet yang kredibel.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Implementasi Program Social Security Number (SSN) dalam Pendataan Masyarakat Miskin di Kota Samarinda***

##### **1. Komunikasi**

Komunikasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan Program SSN di Kota Samarinda, khususnya dalam menyampaikan substansi kebijakan, arah tujuan, serta prosedur teknis kepada seluruh pemangku kepentingan. Komunikasi yang tidak tepat, tidak jelas, atau tidak tersampaikan secara utuh sering kali menimbulkan kesalahpahaman (miskomunikasi) yang dapat menghambat

efektivitas implementasi kebijakan. Adapun tahapan komunikasi dalam implementasi program sebagai berikut:

a. Transmisi Informasi

Dalam konteks Program *Social Security Number* (SSN) di Kota Samarinda penyampaian kebijakan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 58 Tahun 2022 dilakukan oleh pemerintah melalui arahan langsung Wali Kota Samarinda kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana teknis lalu ke OPD terkait. Namun, komunikasi belum menjangkau masyarakat secara optimal. Sosialisasi tidak dilakukan secara luas, hanya dilakukan saat pembagian bantuan, sehingga banyak penerima bantuan yang tidak memahami tujuan program SSN.

b. Kejelasan Informasi

Informasi mengenai program SSN cukup jelas bagi pelaksana teknis, terutama dalam hal prosedur verifikasi dan validasi data berbasis DTKS. Peran PSM sangat penting dalam memastikan keakuratan data penerima bantuan. Kejelasan informasi ini membantu pelaksana menjalankan tugas secara tepat dan meminimalkan kesalahan implementasi. Selain itu, kejelasan komunikasi memperkuat koordinasi dan memperkecil potensi penyimpangan data.

c. Konsisten Informasi

Program SSN menunjukkan konsistensi dalam penggunaan data yang telah diverifikasi sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan. Dinas Komunikasi dan Dinas Sosial menjalankan program berdasarkan satu basis data yang sama, sehingga tidak ada perbedaan informasi dari pusat ke pelaksana di lapangan. Konsistensi ini mencegah kebingungan, menjaga ketepatan sasaran, dan meningkatkan kepercayaan terhadap program.

## 2. Sumberdaya

Efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan atau program, termasuk Program *Social Security Number* (SSN) di Samarinda, sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Meliputi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana. Dalam program SSN di Samarinda, kelengkapan sumber daya ini esensial untuk mencapai tujuan program, yaitu pendataan yang akurat dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

a. Sumber Daya Manusia

Diskominfo memiliki staf yang kompeten dalam pengembangan sistem digital, namun untuk pendataan ulang diperlukan tambahan tenaga pencacah data hingga 500 orang. Di lapangan, verifikasi dan validasi data dilakukan melalui kerja sama Kelurahan, RT, dan PSM yang memahami kondisi sosial masyarakat. Implementasi SSN menunjukkan pentingnya sinergi antara kapasitas teknis dan pendekatan berbasis komunitas, yang mencerminkan bahwa keberhasilan program bergantung pada kompetensi, koordinasi, dan peran aktif pelaksana kebijakan di berbagai level.

b. Sumber Daya Anggaran

Program SSN dibiayai melalui APBD dengan alokasi yang terkelola secara efisien. Pengembangan aplikasinya ditangani oleh programmer internal Diskominfo tanpa memerlukan anggaran tambahan. Sebagian besar dana digunakan untuk mencetak kartu SSN (Rp 25.000 per kartu) dan konsumsi kegiatan, sedangkan biaya administrasi pengelolaan kartu melalui Bank Kaltimara hanya satu kali dan tidak dibebankan bulanan kepada penerima. Efisiensi ini memperlihatkan kemandirian teknis berkat SDM kompeten, meski perlu evaluasi berkala untuk memastikan anggaran cukup bagi pelatihan, pembaruan teknologi, dan keamanan data.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam mendukung pelaksanaan Program SSN di Kota Samarinda. Kartu SSN (SSC) berfungsi seperti kartu ATM dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk berbelanja di KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan e-warung. Sistem pendukung berupa aplikasi digital dikembangkan oleh Diskominfo untuk menyimpan dan memverifikasi data penerima, dengan akses terbatas demi menjaga kerahasiaan data pribadi. Meski pengembangan teknologi dilakukan secara mandiri, tantangan muncul dalam distribusi kartu dan kebutuhan infrastruktur seperti penyebaran KUBE yang belum menjangkau setiap kelurahan ada. Saat ini pemerintah memanfaatkan KUBE yang tersebar di 10 kecamatan sebagai sarana penyaluran bantuan sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal.

### 3. Struktur Birokrasi

George C. Edward III (1980) mengemukakan bahwa struktur birokrasi termasuk pembagian tugas yang jelas, rantai komando terdefinisi, pengawasan efektif, dan mekanisme pengambilan keputusan terstruktur merupakan kunci sukses implementasi kebijakan. Di Kota Samarinda, Program SSN telah dibangun dalam kerangka birokrasi yang melibatkan Diskominfo (pengembang aplikasi dan verifikator data), Dinas Sosial (penyedia data DTKS dan bantuan), serta kelurahan, RT dan PSM sebagai pelaksana verifikasi lokal. Meskipun tugas pokok dan fungsinya sudah tertuang di sistem SSN, praktik di lapangan masih menemui hambatan dimana kebijakan tertulis yaitu Perwali No. 58 Tahun 2022 belum mencantumkan peran KUBE, sehingga perlu revisi agar struktur formal lebih responsif terhadap kebutuhan teknis. Pengawasan SSN berjalan lewat evaluasi berbasis Rencana Anggaran dan Kegiatan SKPD (RAASKPD), dengan target output dipantau secara rutin oleh Walikota. Namun, kelambanan revisi kebijakan pusat dan distribusi kartu yang belum merata menunjukkan kekakuan dalam struktur saat ini. Meski begitu, kesadaran untuk terus menyesuaikan peraturan, meningkatkan koordinasi antar tim, dan memperkuat kapasitas pengambilan keputusan di tingkat operasional menjadi indikator kemajuan. Dengan perbaikan perencanaan, transparansi pelaporan, dan pengawasan yang

akuntabel, struktur birokrasi SSN diharapkan semakin matang, sehingga kebijakan dapat dijalankan dengan lebih lancar, cepat, dan tepat sasaran.

#### **4. Disposisi**

Sikap pelaksana termasuk pemahaman, penerimaan, dan komitmen mereka terhadap kebijakan menjadi penentu utama keberhasilan Program SSN menurut Edward III (1980). Pelaksanaan program SSN di dukungan kuat dari Wali Kota hingga staf bawah mencerminkan disposisi positif, namun tantangan muncul saat data asal yang bersumber dari DTKS menurut salah satu RT di Kelurahan Karang Anyar sekitar 80% tak sesuai kenyataan lapangan sehingga diperlukan adanya verifikasi ulang. PSM berperan penting menyalurkan informasi dan mendampingi warga, menunjukkan inisiatif lokal yang mendukung efektivitas program. Kepatuhan terhadap regulasi Perwali No. 58 Tahun 2022 dan belum tercantumnya KUBE sebagai mitra resmi dalam Perwali menunjukkan perlunya revisi agar pelaksanaan kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan. Upaya validasi dan pembaruan data secara berkala oleh Diskominfo mencerminkan kesadaran pelaksana dan disposisi adaptif terhadap pentingnya data yang akurat untuk efektivitas program. Keseriusan pemerintah dalam memperbarui data DTKS secara berkala menegaskan komitmen mereka pada akurasi sebagai landasan implementasi. Meski demikian, distribusi kartu yang belum merata dan target yang baru akan tercapai pada 2025 mengindikasikan bahwa walaupun disposisi pelaksana umumnya positif namun masih ada hambatan operasional yang perlu diatasi agar program benar-benar efektif.

### **Faktor Pendukung Program *Social Security Number* (SSN) dalam Pendataan Masyarakat Miskin di Kota Samarinda**

#### **1. Kolaborasi dan koordinasi dalam implementasi Program *Social Security Number* (SSN) di Kota Samarinda.**

Penelitian di Kota Samarinda menunjukkan bahwa kolaborasi dan koordinasi antar instansi sangat penting untuk keberhasilan Program *Social Security Number* (SSN). Peran dan tanggung jawab setiap instansi pelaksana telah diatur jelas dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 58 Tahun 2022 dan SK Wali Kota Nomor: 465-05/575/HK-KS/X/2022, menciptakan struktur birokrasi yang tidak tumpang tindih dan mendukung koordinasi.

#### **2. Optimalisasi sumber daya manusia dan teknologi dalam implementasi Program *Social Security Number* (SSN).**

Teknologi informasi dimanfaatkan secara optimal untuk menyimpan dan memperbarui data masyarakat miskin di Kota Samarinda, dengan pembaruan minimal setiap satu hingga dua tahun untuk menjaga akurasi. Selain itu, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) berkontribusi langsung melalui verifikasi lapangan. Kombinasi optimalisasi SDM dan teknologi, kolaborasi internal Diskominfo, kompetensi SDM, serta keterlibatan aktif PSM, menunjukkan bahwa faktor sumber daya telah terpenuhi dengan baik dalam program ini.

### **3. Adanya dukungan pimpinan dalam pelaksanaan Program *Social Security Number* (SSN).**

Meskipun SSN dijalankan oleh tim teknis, Wali Kota aktif terlibat dalam rapat koordinasi, evaluasi rutin untuk memastikan program dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan dan masalah dapat segera diatasi. Ini membuktikan bahwa pimpinan tidak hanya simbolis, tetapi juga mengawasi dan mengarahkan program di lapangan. Dukungan langsung dari Wali Kota Samarinda sangat penting bagi keberhasilan Program *Social Security Number* (SSN). Ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pimpinan daerah untuk memastikan program mencapai tujuannya. SSN dipantau langsung oleh Wali Kota, menunjukkan dukungan politik yang kuat untuk keberlanjutan. Evaluasi dan koordinasi.

### **4. Adanya dukungan anggaran dan kolaborasi institusional dalam menunjang Program *Social Security Number* (SSN).**

Program *Social Security Number* (SSN) di Kota Samarinda menunjukkan bahwa dukungan anggaran dari APBD dan kolaborasi strategis dengan Bank Kaltimara menjadi faktor pendukung utama. Kerjasama ini tidak hanya mempermudah aspek teknis penerbitan kartu, tetapi juga menunjukkan sinergi antar lembaga dalam mendukung pelayanan publik.

## ***Faktor Penghambat Program *Social Security Number* (SSN) dalam Pendataan Masyarakat Miskin di Kota Samarinda (SSN) dalam Pendataan Masyarakat Miskin di Kota Samarinda***

### **1. Keterlambatan Informasi Distribusi Bantuan Program *Social Security Number* (SSN).**

Adanya hambatan informasi seperti lambatnya penerbitan kartu SSN dan distribusi sembako yang terjadwal pasti. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat seringkali tidak sesuai kenyataan. Selain itu, sistem distribusi bantuan yang tidak lancar juga berkontribusi pada keterlambatan, dengan sembako sering dibagikan sekaligus atau dirapel dua bulan. Keluhan masyarakat yang menginginkan bantuan dalam bentuk uang tunai mengindikasikan bahwa kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini mencerminkan kurangnya kepekaan sikap pelaksana (disposisi) terhadap kondisi masyarakat.

### **2. Kendala Teknis dalam Pendataan Masyarakat Miskin oleh *Surveyor*.**

Sikap dan komitmen para pelaksana lapangan, khususnya *surveyor*, sangat memengaruhi kualitas data yang dihasilkan. Ketika pelaksana kurang berkomitmen atau kesulitan mengikuti standar kerja, data menjadi tidak akurat. Meskipun Dinas Komunikasi dan Informatika sudah menerapkan sistem reward and punishment, beberapa *surveyor* tetap tidak memenuhi standar atau memilih mengundurkan diri. Ini menegaskan bahwa sikap dan keseriusan pelaksana adalah faktor penentu keberhasilan implementasi program.

### **3. Keterbatasan Sponsor Bantuan pada Tahap Awal Pelaksanaan Program *Social Security Number* (SSN)**

Pada awal implementasi Program *Social Security Number* (SSN) di Samarinda pada tahun 2022, kendala utama yang muncul adalah kesulitan mendapatkan dukungan dari sponsor atau mitra penyedia bantuan sosial. Diskominfo akhirnya menerima bantuan dari BAZNAS, bantuan tersebut hanya dapat diberikan kepada masyarakat muslim karena bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah yang diatur secara agama dan hukum. Ini menunjukkan ketergantungan program pada sumber bantuan yang tidak universal, sehingga pemerintah kesulitan menjangkau semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Ini berakibat pada penundaan distribusi kartu SSN.

### **4. Kurang Meratanya Pembagian Kartu SSN Sebagai Alat Transaksi dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Sebagai Tempat Penyalur Bantuan**

Masalah pemerataan distribusi kartu SSN dan belum meratanya KUBE juga terkait dengan program SSN yang masih berjalan bertahap. Ini mengisyaratkan keterbatasan sumber daya teknis dan operasional dalam pencetakan, pendataan, dan distribusi kartu. Kondisi ini menyoroti pentingnya struktur birokrasi yang responsif dan adaptif terhadap kondisi lapangan

### **5. Adanya Perubahan Kebijakan**

Program *Social Security Number* (SSN) di Kota Samarinda menghadapi kendala awal akibat ketidaksesuaian praktik lapangan dengan dasar hukum yang ada. Penggunaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai penyedia sembako tidak tercantum eksplisit dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 58 Tahun 2022. Ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mengharuskan revisi kebijakan untuk memberikan legitimasi formal bagi keterlibatan KUBE, meskipun perannya di lapangan sudah berjalan.

### **6. Ketidakesuaian Antara Konsep dan Pelaksanaan Penggunaan Kartu *Social Security Number* (SSN) Sebagai Identitas Resmi Masyarakat Miskin di Kota Samarinda**

Meskipun kartu SSN dirancang sebagai identitas tunggal yang terintegrasi untuk masyarakat miskin (memuat NIK dan barcode untuk verifikasi serta transaksi bantuan), fungsinya sebagai identitas utama belum sepenuhnya terealisasi.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian implementasi Program *Social Security Number* (SSN) dalam pendataan masyarakat miskin di Kota Samarinda belum berjalan optimal. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi George C. Edward III yaitu pada indikator komunikasi antar pelaksana sudah berjalan baik tetapi perlu ditingkatkan pada transmisi kepada masyarakat agar tujuan program dipamahami masyarakat penerima manfaat.

Indikator sumberdaya dinilai berhasil karena aspek sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sarana dan prasarana sudah dimanfaatkan secara optimal meskipun masih ada keterbatasan pada distribusi kartu SSN dan penyediaan KUBE di setiap kelurahan. Struktur birokrasi dalam implementasi program sudah terbentuk namun belum sepenuhnya berhasil karena dalam pelaksanaan program masih perlu penyesuaian dan penyempurnaan. Disposisi atau sikap pelaksana sudah menunjukkan sikap komitmen terhadap pelaksanaan program dan dukungan yang cukup kuat baik dari tingkat atas maupun bawah.

Pelaksanaan program didukung oleh kolaborasi institusional dan koordinasi antar instansi terutama adanya dukungan langsung dari pimpinan yaitu Walikota Samarinda. Adanya optimalisasi sumber daya manusia dan teknologi turut menjadi faktor pendukung karena mampu menekan penggunaan anggaran dari APBD. Adapun faktor yang menjadi penghambat program yaitu terdapat kendala teknis oleh surveyor dan kurangnya sponsor bantuan pada awal berjalannya program. Selain itu, terdapat keterlambatan informasi distribusi bantuan dan masih belum meratanya KUBE dan distribusi kartu SSN yaitu sebagai kartu identitas masyarakat miskin yang dinilai tidak sesuai konsep sebagai kartu identitas.

#### **Saran**

1. Terkait dengan permasalahan keterlambatan informasi distribusi bantuan Program *Social Security Number* (SSN), diharapkan pemerintah atau Dinas terkait dapat memberikan bantuan secara rutin dan terjadwal agar masyarakat bisa mengetahui jelas kapan akan menerima bantuan dan bisa memanajemen bantuan yang diterima sampai dapat bantuan berikutnya.
2. Terkait dengan adanya kendala teknis dalam pendataan masyarakat miskin oleh *surveyor*, diharapkan selanjutnya pemerintah atau Dinas terkait dapat meningkatkan pelatihan dan seleksi terhadap surveyor dan menjamin kejelasan sistem kerja dan pembagian tugas.
3. Terkait dengan adanya keterbatasan sponsor bantuan pada tahap awal pelaksanaan Program *Social Security Number* (SSN), diharapkan selanjutnya para implementor dapat membangun kerja sama dengan lembaga non-keagamaan atau korporasi agar pelaksanaan Program SSN dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.
4. Terkait dengan kurang meratanya pembagian kartu SSN sebagai alat transaksi dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) sebagai tempat penyalur bantuan, diharapkan pemerintah atau Dinas terkait dapat segera menyelesaikan pembagian kartu SSN kepada penerima manfaat dan Dinas Sosial dapat membuat KUBE lebih tersebar ke setiap Kelurahan di Kota Samarinda.
5. Terkait dengan adanya ketidaksesuaian antara konsep dan pelaksanaan penggunaan kartu SSN sebagai identitas resmi masyarakat miskin di Kota Samarinda, diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia teknologi melakukan penguatan sistem verifikasi digital agar fungsi kartu SSN benar-benar menjadi satu-satunya identitas dan alat transaksi yang sah bagi penerima bantuan sosial di Kota Samarinda.

### **Daftar Pustaka**

- Anderson, James E. (1970). *Public Policy Making*. New York: Reinhart and Wiston.
- Anggara, S., & Sumantri, L. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Pustaka Setia, 1689–1699.
- Dye, Thomas R. 2011. *Understanding Public Policy*. Singapore: Longman.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik( Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.
- Nurani, D. (2009). Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional (BOS) di SDN Jakarta Selatan.
- Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program *Social Security Number*
- Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program *Social Security Number*
- Purwanto, E. A., & Sulis, D. R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jogjakarta. September, 20.
- Soetari, E. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik*. Pustaka Setia Bandung.
- Warsono, H. (2019). Buku Ajar Teori Administrasi. *Ilmu Administrasi Dan Ilmu Administrasi Negara*, 13–34. [https://doc-pak.undip.ac.id/443/1/buku\\_1\\_Teori\\_Adm\\_.pdf](https://doc-pak.undip.ac.id/443/1/buku_1_Teori_Adm_.pdf)